

Yovita Owa

by UNITRI Press

Submission date: 26-Jul-2022 10:50PM (UTC-0400)

Submission ID: 1857184391

File name: Yovita_Owa.docx (40.31K)

Word count: 1857

Character count: 11712

7
**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA BATU**

1
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



OLEH:
YOVITA OWA
2018110085

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022

RINGKASAN

Anggaran yang dimiliki oleh sebuah desa dapat dikatakan sebagai salah satu APBN yang mana secara langsung diberikan oleh pihak pemerintah pusat terhadap pemerintah yang berada di desa. Sistem penerimaan anggaran desa yang jauh lebih meningkat akan dapat memberikan dampak atau resiko meningkat pula, oleh sebab itu anggaran yang dimiliki oleh desa secara langsung akan dapat diterima serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara efektif, sehingga pihak pemerintah secara langsung akan dituntut untuk dapat mempunyai akuntabilitas dalam mengetahui sebuah pengaruh sistem keuangan dana yang ada di desa terhadap akuntabilitas. Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat mengetahui sebuah pengaruh sistem keuangan dana yang dimiliki oleh desa terhadap akuntabilitas. Metode yang akan digunakan dalam riset ini ialah deskriptif kuantitatif sebagaimana dengan berlandaskan pada data sekunder serta primer yang dilakukan dengan pengisian kuesioner. Jumlah populasi yang akan digunakan dalam riset ini berjumlah 12 Desa yang berada di Kota Batu, sedangkan jumlah responden yang akan digunakan dalam riset ini ialah 36 responden. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam riset ini ialah menggunakan analisis regresi linier berganda yang mana akan dibantu dengan menggunakan Software SPSS 26. Hasil yang ditemukan dalam riset ini ialah keuangan desa (siskeudes) dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Batu.

Kata Kunci : Siskeudes, Akuntabilitas, Pengelolaan dana Desa

PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Sebagaimana yang dituangkan dalam UU Tahun 2004 No 6 yang berkaitan dengan peraturan desa yang mana akan dapat mengalami sebuah tindakan atas perubahan yang sangat signifikan. Dari aspek regulasi sama sekali bukan lagi dari bagian UU pada Tahun 2004 No 32 yang mana akan dapat bertentangan dengan pihak pemerintahan yang ada di sebuah daerah. Adanya UU yang berkaitan dengan desa maka secara langsung akan dapat melatarbelakangi dalam sebuah pertimbangan yang berkaitan dengan pengaturan desa selama dapat diberlakukan yang telah tidak akan dapat disesuaikan terkait dengan tingkat perkembangan pada kedudukan yang berada di lapisan masyarakat desa dan tingkat upaya untuk dapat mendongkrak adanya perkembangan anggaran dalam melaksanakan sebuah sistem pembangunan.

Selain dalam UU yang berkaitan dengan desa dapat dikatakan sebagai salah satu sistem pengawasan pada sebuah desa yang mana mempunyai sebuah hak yang bersumber serta hak yang secara tradisional untuk dapat dilakukan untuk dapat mengatur sebuah kepentingan lapisan masyarakat. Oleh sebab itu secara langsung akan dapat memberikan sebuah kesepakatan pada desa untuk dapat mengelola yang mandiri anggaran desa serta dapat pula akan dapat mengembangkan hasil yang akan dapat dipergunakan untuk dapat memaksimalkan taraf hidup pada lapisan masyarakat. Sistem pengelolaan desa secara langsung akan tidak dapat terlepas dari sistem akuntabilitas. Akuntabilitas yang dibangun dalam ruang lingkup pemerintahan jauh lebih terpenting.

Akuntabilitas merupakan salah satu hal jauh lebih terpenting yang akan dapat dimiliki oleh aspek entitas usaha serta pihak pemerintah dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pihak shareholders (Anto, H. M., et al, 2021). Lapisan pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu organisasi yang mana memiliki tugas serta tanggung jawab untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya di rektor privat akuntabilitas akan ada dalam bentuk otomatis apabila sudah dapat melaksanakan sebuah tingkat atas penerbit pada pasar modal serta tingkat entitas terhadap kapasitas sebagai salah satu fudasi dalam sebuah lapisan masyarakat Widyatama et al (2017). Adapun sebuah perbedaan akuntabilitas serta privat yang mana dapat dikatakan sebagai hal yang akan dapat digunakan. Salah satu akuntabilitas yang berada pada lapisan pemerintah yang akan dapat dinilai jauh lebih terpenting

sehingga dapat disebabkan sebuah akuntabilitas yang ada serta dapat pula akan dapat memaksimalkan pada tingkat kepercayaan.

Anggaran desa merupakan sebuah anggaran yang secara langsung akan dapat diberikan oleh pihak pemerintah yang akan bersumber dari APBN yang mana akan dapat bertujuan untuk dapat memperhitungkan anggaran yang ada pada desa. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berkaitan dengan sistem pemerintahan desa yang dapat mengalokasikan anggaran yang akan dapat melalui sebuah aspek transfer terhadap Kota. Sebagaimana anggaran yang ada maka pada setiap saat Kota dapat untuk mengalokasikan terhadap desa yang akan berlandaskan pada pada jumlah desa yang mana akan dapat juga memperkuat pada sisi penduduk yang akan mencapai 30% serta jumlah terhadap luas wilayah 20%, 50% kemiskinan. Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara secara langsung akan dapat diterima oleh pihak desa untuk dapat menyebabkan sebuah penerimaan akan dapat meningkat. Dalam penerimaan anggaran desa yang mana akan dapat memaksimalkan ini yang mana tentunya sangat dibutuhkan pada sebuah laporan finansial yang mana akan dapat memberikan pertanggung jawaban pada desa (Permendagri Nomor 113, 2014). Permendagri Nomor 113 (2014) yang mana akan dapat berkaitan dengan sistem pengelolaan finansial desa untuk dapat memberikan sebuah tindakan penyempurnaan terhadap sebuah Pemendagri tahun 2017 No 37 yang berkaitan dengan PPKD.

Pada dasarnya sistem akuntansi akan dapat direncanakan serta dapat pula dilaksanakan secara efektif. Sistem akuntansi yang akan dikembangkan pada sebuah kelompok atau organisasi mempunyai sebuah tujuan untuk dapat mencari data yang jauh lebih efektif (Indralesmana & Suaryana, 2014). Hal tersebut akan dapat direncanakan berlandaskan pada SIAK. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Julianto & Dewi, 2019) yang mengatakan bahwa SKD dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap tingkat keberhasilan dalam mengelola anggaran desa. Sebuah aplikasi SISKEUDES dapat dikatakan sebagai salah satu Kemndagri yang akan diberikan sebuah kerja sama terhadap BPKP untuk dapat mempermudah dalam melaksanakan pencatatan sebuah laporan finansial.

Dalam melaksanakan SISKEUDES yang mana dapat memberikan sebuah himbauan KPK sebagaimana yang dituangkan dalam sebuah surat pada Tahun 2016 No 7508/01-16/08/2016 terhadap semua pimpinan desa dalam hal ini kepala desa yang berada di NKRI untuk itu secara langsung akan dapat menggunakan SISKEUDES sebagaimana dalam melaksanakan sebuah sistem pengelolaan finansial desa. SISKEUDES secara langsung akan dapat menghasilkan RPJM, RKP serta APB. (Mahayani, 2017) menyatakan bahwa salah satu akuntabilitas tidak saja akan sekedar dapat melakukan sebuah tanggung jawab finansial yang

secara formal terhadap sebuah prinsip akan dapat bertanggung jawab yang dapat dikelompokkan dalam beberapa hal misalnya pihak pemerintah, masyarakat serta lingkungan organisasi.

Adapun salah satu tuntutan yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam mengelola keuangan yang dimiliki oleh desa akan dijadikan sebagai salah satu perhatian yang secara khusus terhadap semua perangkat yang berada di dalam desa, disebabkan karena sistem akuntabilitas secara langsung akan dapat mendorong pada tingkat kesuksesan yang akan dicapai oleh salah satu visi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang desa ialah dapat dilaksanakan desa yang mandiri serta maju. Dalam melakukan sebuah tindakan atas tanggung jawab yang akan diinterpretasikan dalam salah satu jenis laporan finansial yang akan dapat dihasilkan berlandaskan pada mekanisme akuntansi yang tak terlepas dari akuntabilitas serta tingkat keterbukaan anggaran desa. (Gayatri et al., 2017) menyatakan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sebuah finansial pada sebuah desa yang tak terlepas dari akuntabilitas yang mana akan dapat terwujudnya sistem pengelolaan sebuah laporan finansial yang jauh lebih efisien. Pihak pemerintah akan dapat berperan sebagai salah satu pengelolaan finansial yang mana tak terlepas dari penyajian data atau informasi finansial serta dapat pula memberikan sebuah pelayanan dalam pengambilan sebuah keputusan terhadap tingkat perekonomian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Fajri et al., 2015) menyatakan bahwa dalam melakukan sebuah kegiatan dalam untuk menghasilkan tingkat keahlian bahkan dapat pula untuk bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan anggaran yang ada di desa.

Dilansir dari (Kompas.com, 2021) sebagaimana yang diungkapkan oleh ICW bahwa pihak pemerintah bertanggung jawab untuk dapat mengontrol terhadap penggunaan anggaran yang dimiliki oleh pedesaan. Hal tersebut dapat pula disampaikan berlandaskan pada salah satu fenomena korupsi sebagaimana dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini pejabat. Pada tahun 2015 – 2020 ditemukan kasus fraud yang mana dapat terjerat kasus pada lapisan perangkat desa. Kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp 111 miliar. Dari angka tersebut terletak pada bagian kedua (2) di tahun 2020, sebagaimana telah dilakukan salah satu praktek korupsi sebagaimana dapat dilakukan para klaster berpolitik diantaranya pimpinan daerah serta para anggota legislatif yang mencapai Rp 115 miliar.

Sebagaimana dalam sebuah riset yang dilakukan pada sebuah desa Kota Batu. Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji yang terdiri dari 12 Desa diantaranya Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo, Desa Gunungsari, Desa Tulungrejo, Desa Pandanrejo, dan Desa Sumberbrantas. Maraknya kasus korupsi dana desa yang terjadi belakangan ini menjadi

perhatian khusus pemerintah daerah dalam memberantas kasus korupsi dana desa. Beberapa waktu lalu pimpinan desa dalam hal ini kepala desa yang berada di Kabupaten Malang dapat melakukan tingkat kejahatan terkait anggaran sebesar Rp 240 Juta. Menurut Agus, Hudi selaku kepala desa yang dikatakan sebagai salah satu tindakan yang sama sekali tidak terpuji yang mana seharusnya dilakukan pemeriksaan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang (detikNews,2021).

Terbaru kasus kaur keuangan serta salah seorang bendahara di Kota Batu, Kecamatan Bumiaji Desa Desa Bulukerto dilakukan proses pemeriksaan sampai ditahan pada tahun 2020 karena melakukan tindak pidana dengan penyalahgunaan anggaran yang dimiliki oleh negara mencapai Rp 338 Juta. Pimpinan kejaksaan yang berada di Kota Batu menyatakan bahwa tersangka sekaligus akan ditahan serta dapat diproses berlandaskan pada aturan yang berlaku, karena finansial yang ada digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan secara pribadi. Problem inilah secara terus menerus akan bergulir sampai dengan tahun 2021 tepat pada bulan Januari, serta para pihak saksi akan melaksanakan tindakan pengumpulan informasi terkait dengan fenomena yang terjadi. (Jatimnow.com, 2021) menyatakan bahwa kejadian hukumnya akan berikan terhadap pihak yang berkepentingan untuk diproses pada jalur hukum pidana. Hal tersebut sama sekali tidak terlepas dari salah sebuah pengetahuan seorang leader yang ada, serta pada prinsip seorang pimpinan yang berada di desa sebagaimana mempunyai tingkat atas kewenangan dalam memahami terkait dengan birokrasi pada wilayahnya sendiri.

Penelitian ini masih menarik diteliti karena ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang hasilnya inkonsisten. Dari kasus yang terjadi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pada Desa yang ada di Kota Batu. Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik **“PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA BATU”**

2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat dalam riset ini ialah : Apakah Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ?

3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat dalam riset ini ialah : Apakah Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian yang ada, sehingga dalam riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat dalam riset ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Pada dasarnya dalam kajian teoritis salah satu manfaat riset ini ialah agar dapat dijadikan bahan *literature* untuk menunjang pemahaman terhadap peneliti yang mana akan dapat berkaitan dengan Akuntansi.

2. Manfaat Praktisi

a. Manfaat bagi akademisi

Bagi akademisi, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi tambahan dan pemahaman sebagaimana dapat berguna terhadap pembaca serta bahan referensi berkaitan dengan Sistem Keuangan Desa.

b. Manfaat bagi Perangkat Desa

Bagi perangkat desa, hasil dari riset ini juga akan selalu diharapkan untuk memberikan kontribusi serta menambah manfaat bagi para pengambil kebijakan di pemerintahan desa yang ada di Kota Batu dan dapat menambah informasi aktual yang terkait dengan Sistem Keuangan Desa.

c. Manfaat Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi Mahasiswa/i Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya mahasiswa/i program studi Akuntansi yang ingin meneliti lebih lanjut berkaitan dengan Sistem Keuangan Desa serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Yovita Owa

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	6%
2	Garuda.Kemdikbud.Go.Id Internet Source	1%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
6	repository.atmaluhur.ac.id Internet Source	1%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	lisyabab-staimas.e-journal.id Internet Source	<1%
9	123dok.com Internet Source	<1%

10 jim.unsyiah.ac.id <1 %
Internet Source

11 www.sciencegate.app <1 %
Internet Source

12 www.scribd.com <1 %
Internet Source

13 repository.ub.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On